ULANGAN TENGAH SEMESTER

**MANAJEMEN PENDANAANAN PENDIDIKAN ISLAM**

KUALITAS DAN BIAYA PENDIDIKAN

Dosen Pengampu:

Dr. Reni Oktafia, M.EI



Oleh:

Farid Kurnia Ilahi

188610800015

MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
2019

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

“Pendidikan merupakan usaha raksasa yang melibatkan banyak pendanaan, tenaga, fasilitas maupun sumber-daya dalam kurun waktu lama. Pendidikan berorientasi ke masa depan. Pendidikan merupakan usaha raksasa untuk mempersiapkan dan memberdayakan manusia menyongsong masa depan yang lebih baik. Pendidikan merupakan usaha raksasa pemerintah dalam mengembangkan potensi diri peserta didik supaya menjadi berdaya dalam situasi pembelajaran.Pendidikan berjangka waktu lama, berjenjang, berstruktur, bersifat horizontal maupun vertikal.Penyelenggaran dan pengaturan pendidikan tertuang dalam sistem pendidikan nasional.Pendidikan terlaksana karena usaha pemerintah yang serius dalam mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, dilakukan secara terencana supaya terwujud aktivitas belajar yang kondusif, dan proses permbelajaran yang produktif. Pembelajaran merupakan core bussiness-nya.pendidikan. Pembelajaran menjadi kegiatan intisebab pendidlkan merupakan usaha raksasa dalam mencerdaskanbangsa.Mengulas tentang pendanaan pendidikan yang harus dikeluarkan dalam investasï dibidang SDM, menurutnya ada dua komponen penting yang harus dipendanaani dalam ekonomi pendidikant yaitu pendanaan langsung (direct cost) dan pendanaan tidak langsung (indirect cost).[[1]](#footnote-2)”

“Pendidikan yang cukup, dalam kemampuan dan kecerdasan sesungguhnya merupakan modal dasar untuk belajar, tetapi ternyata tidak demikian bagi anak yang kurang mampu ekonominya. Anak yang memiliki cukup peluang untuk bisa bertahan dalam beiajar, menjadi gagal karena ketiadaan biaya untuk belajar. Pendidikan memang memerlukan biaya, pendidikan tidak bisa gratis, latar belakang sosio-ekonomi seorang anak dalam keluarganya berpengaruh tinggi terhadap keberhasilan pendidikan. Sebab biaya belajar berpengaruh terhadap kesanggupan seseorang anak dalam menyelesaikan semua program belajar dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan dan dari bulan ke tahun, serta dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab anak tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena drop-out, yang disebabkan karena alasan ekonomi, Sekalipun tes menunjukkan bahwa anak tersebut lolos seleksi dengan tingkat kemampuan yang sama, namun ternyata dia tak dapat menyelesaikan program belajar yang dinginkannya, karena ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk studinya.”

Pendanaan Iain yang perlu diperhitungkan dalam pengertian pendanaan tidak langsung adalah pendanaan pengorbanan anak, berupa hilangnya pendapatan peserta didik karena belajar, disebut earning for gone by student, yaitu keuntungan yang hilang pada waktu mengikuti pendidikan, berupa kesempatan yang dikorbankan karena tidak bekerja atau keuntungan yang tidak diperoleh selama menempuh pendidikan.[[2]](#footnote-3)

Pendanaan pendidikan diperuntukan bagi terselenggaranya aktivitas pembelajaran dalam mencapai etos bangsa yang luhur yang tercantum dalam tujuan pendidikan.Tujuan ini bersifat filosofis, luas, menyeluruh dan mendasar dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.Segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dicurahkan untuk terwujudnya pelaksanaan pendidikan. Segala daya dan upaya pemerintah di pusatkan untuk menyediakan kesempatan belajar bagi seluruh warganya. Keseriusan pemerintah dalam menyelenggaran pendi dikan tampak jelas dalam undang-undang dasar yang memprioritaskan pendanaan pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara, jauh melampaui pendanaan penyelengaraan pertahanan maupun kesehatan atau departemen lainnya. Pemerintah menyadarinya bahwa pendidikan merupakan usaha strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan diselenggarakan dengan serius dan disadarai sebagai amanah undang-undang dasar yang harus direalisasikan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, yang mampu berkompetisi dalam kerja sama internasionalt karena bangsa Indonesia memiliki kemampu an dan kecerdasan serta keunggulan yang sama dengan bangsabangsa lain di dunia. Itulah sebabnya pemerintah menyediakan anggaran pendanaan yang paling besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Secara explisit tujuan pendidikan berupa "usaha mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulla, jujur, sehat, berilmu pengetahuant cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Undang-Undang Sisdiknas 2003).

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Biaya Pendidikan**

“Biaya pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan baik oleh keluarga yang menanggung anak yang sedang bełajar masyarakat maupun oleh lembaga penyelenggara pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang diinginkannya. (STEPPES, Biro Perencanaan Depdikbud, 1989). Semakin lama belajar seorang, semakin besar biaya yang harus ditanggungnya. Semakin tinggi pendidikan yang diikutinya semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkannya. Semakin baik mutu sekolah yang dimasukinya semakin mahal pula ongkos pendidikan yang harus dikeluarkan kełuarga seseorang anak. Contoh dan pernyataan tersebut mengundang pertanyaan yang menarik untuk diperhatikan tentang peran biaya pendidikan. Biaya apa saja sebenarnya yang harus dibayar selama anak mengikuti pendidikan. Apa sebenarnya peranan biaya bagi pendidikan tiap anak dalam mengikutinya. Biaya apa pula yang harus dikeluarkan keluarga maupun oleh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan di suatu sekolah dan bagaimana keterkaitan keduanya, yaitu antara biaya perorangan dan keluarga yang harus dikeluarkan individu anak dengan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh țembaga penyelenggara atau pemerintah.[[3]](#footnote-4)”

Lingkungan sekolah yang atmosfirnya kondusif, sangat memungkinkan sekolah berkembang kearah mutu Yang lebih baik dari kondisinya yang ada. Di dalamnya dibutuhkan kesempatan setiap orang untuk mempunyai pilihan alternatif, saling mengobservasi kegiatan akademik masing-masing (transparansis), berdiskusi tentang pekerjaannya, serta bantuan terhadap guru baru dalam mengembangkan tanggung. Suasana seperti ini sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya mutu pendidikan di sekolah tersebut. Atmoșfir yang bagus merupakan bibit unggul yang akan berkembang mnenjadi buah bila berada dalam budaya pendidikan Yang kuat. Budaya merupakan proses dinamis Yang terbentuk dari penciptaan, Penertiban dan pengolahan nilal-nilai yang ada didalamnya.

“Budaya sekolah adalah budaya akademik di dalamnya terdapat keteraturan, pemanusiaan anak supaya menjadi sumber-daya pembangun bangsa, dan visi masa depan tentang kehidupan. Budaya pendidikan terbentuk karena kebenaran, keilmuan, demokrasi, dan tradisi akademik yang dijunjung tinggi. Lingkungan sekolah yang sehat, dan budaya pendidikan merupakan kondisi yang sangat menunjang bagi terbentuknya mutu sekolah. Keadaan seperti inilah yang memungkinkan mutu pendidikan dapat berkembang dengan pesat, sebab budaya kerja terbentuk, lingkungannya sehat, memungkinkan mutu tumbuh dengan subur. Mutu pendidikan tidak terjadi secara alamiah, ia terbentuk bila dikelola dengan manajemen yang baik. Direncanakan, digali sumberdayanya, dibiayai, diciptakan iklim organisasinya, diseleksi sumber daya manusianya, diawasi pelaksanaan kegiatannya, dikelola secara profesional dan dipimpin secara efektif efisien. Sehingga terbentuklah budaya kerja yang bertanggung jawab, penuh dedikasi, profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Mutu pendidikan merupakan perpaduan dari .unsur guru, program belajar atau kurikulum, manajemen yang tangguh serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah, dalam membiayai pendidikan. Manajemen yang tangguh dalanp mewujudkan mutu sekolah sangat berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan kepala sekolahnya. Beberapa studi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Dedi Supriadi, dan Z.A Achmady, peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sangat dominan dalam mewujudkan mutu sekolan yang baik.[[4]](#footnote-5)”

“Sementara itu, menurut Gaustad (1992) Kepala Sekolah terbukti menunjukkan peranan kunci dalam menegakkan disiplin sekolah, melalui kemampuannya dalam mengelola sekolah, memberikan teladan kepada siswa dan guru serta melakukan teknik-teknik ”social rewards” kepada siwa dan guru (dikutip dari Bapenas 1999:79-80). Peranan kepala sekolah dalam mengelola seluruh sumber potensi sekolah termasuk sumber potensi uang untuk membiayai penyelenggaran pendidikan, sangat menentukan, sebab komponenkomponen: man, money, and materil tidak akan dapat menjelma berwujud tujuan yang akan dicapai jika tidak dikelola oleh seorang pemimpin sekolah yang tangguh. Peranan biaya dalam mewujudkan mutu pendidikan memberi kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan, sama pentingnya seperti sumber-daya lain seperti material dan human resources. Namun kesemua ini hanya akan menjelma dengan kemampuan manajemen yang fungsional.”

1. **Mutu Pendidikan**

“Mutu pendidikan merupakan prestasi terbaik yang diharapkan dapat dicapai oleh lembaga penyelenggara pendidikan, ia berupa prestasi yang tidak boleh kurang dari standard, bahkan harus melebihi standard yang ditetapkannya. Ia merupakan harapan tertinggi, terunggul yang harus dicapai oleh suatu lembaga yang harus dapati memenuhi harapan dan kepuasan lembaga memberi kepuasan kepada pemakai produk lembaga tersebut. Baik pemerintah, masyarakat maupun dunia kerja. Mutu merupakan keistimewaan produk dari lembaga pendidikan, merupakan jaminan yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, dan nilai guna bagi lembaga pemakai produknya. Keistimewaan harus bebas defisiensi, dan ia harus:”

1. Kecil tingkat kesalahan
2. Pelanggan tidak dikecewakan
3. Bebas dari pemborosan
4. Efisein
5. Bebas dari keterlambatan[[5]](#footnote-6)

“Masalah mutu merupakan masalah yang sangat relatif dan subjektif. Oleh karena itu, tergantung dari segi mana orang melihatnya. Bisa jadi lembaga pendidikan yang kegiatannya tidak pernah tersendat dan dapat berjalan dengan lancar, yang proses penyelenggaraan pembelajarannya berjalan sesuai dengan kalender akademiknya. Bisa jadi karena memilki sumber-daya manusia dan fasilitas yang sesuai dengan keperluan, bisa jadi karena lulusannya diterima diperguruan tinggi yang balk, bisa jadi yang lulusannya dapat bekerja dan tidak ada yang nganggur. Bisa jadi karena anggaran biaya untuk pelaksanaan pendidikan dan gaji gurunya cukup memadai. Namun, masalah mutu merupakan masalah yang dituntut setiap saat dan tidak pernah berhenti. la sudah merupakan suatu tuntutan yang terus menerus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pendidikan harus terus menerus mengupayakannya, sesuai dengan tuntutan zaman, dan tuntutan kebutuhan yang terus maju dan berubah. Tuntutan terhadap mutu merupakan tuntutan yang terus menerus, terus dituntut, terus dibutuhkan. Oleh karena itu, harus terus diupayakan walaupun lambat, tetapi pasti.”

“Usaha memenuhi tuntutan yang diharabkan dalam dunia mutu disebut pelayanan. Artinya mutu itu sama dengan pemberian layanan yang terus menerus sesuai dengan tuntutan dan harapan pengguna / pelanggan yang membutuhkannya. Semakin baik dan semakin sempurna pelayanan yang diberikan semakin dibutuhkan biaya Yang mahal untuk merealisasikannya. Mengingat semua pihak berkepentingan, baik pemerintah masyarakat dunia kerja maupun lembaga pendidikan sendiri berkepentingan dengan mutu yang baik, maka para pembuat kebijakan harus menjadikan mutu .șebagai kebutuhan sebagai prioritas utama untuk dibiayai, Pendidikan harus menjadi prioritas utama, biaya dan anggaran pendidikan harus ditingkatkan secara cukup membiayainya. Bila tidak menjadi prioritas dalam bentuk putusan ia hanya menjadl slogan sekedar retorika belaka. Baik pusat mapun pemerintahan daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan, harus menjadikan mutu sebagai masalah utama yang menjadi prioritas kebijakan untuk dibiayai. Harus menjadi kebijakan yang mendapat persetujuan bersama untuk mengupayakannya biayanya. Keputusan untuk menjadikan mutu sebagai usaha yang menjadi tanggung jawab bersama merupakan keputusan yang diharapkan, selanjutnya kebijakan tersebut akan mendapat ujian pada setiap level pelaksanaannya.”

Mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan para kepala sekolah. Ia menjadi tanggung jawab bersama, menjadi masalah bersama, yang harus diusahakan. Baik oleh sekolah sendiri, organisasi yang berkaitan dengan penyenggaraan pendidikan, pemerintah maupun masyarakat. Komitmen kebijakan terhadap mutu merupakan sumber utama Iahirnya anggaran pendidikan yang cukup. Kemauan untuk menjadikan mutu sebagai misi yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan akan dapat di realisasikan. Tanpa kemauan politik untuk membiayai pendidikan yang cukup, mutu hanya menjadi impian.[[6]](#footnote-7)

“Banyak sekali bentuk dari model pendidikan salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren, ada sesuatu yang diperlukan upaya-upaya dan terobosan-terobosan dalam pengembangan pondok pesantren dalam mencapai mutu pondok pesantren yang optimal, hal ini dapat terwujud melalui tata kelola yang baik, sehingga dapat menunjang kegiatan operasional pondok pesantren. Lembaga pendidikan pondok pesantren telah lama bertahan dan tetap eksis hingga kini.Kemampuan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan telah diakui sebagai bagian lembaga pendidikan nasional. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah pondok pesantren yang cukup banyak, terdapat sekitar 4.189 pondok pesantren yang tersebar di kabupaten dan kota di Jawa Timur (Kemenag 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren di Jawa Timur, masih banyak diminati para santri sebagai tempat untuk menuntut ilmu.[[7]](#footnote-8)”

1. **Sumber Biaya Pendidikan**

“Setiap negara pada umumnya menyadari bahwa pengeluaran untuk pendidikan telah melonjak selama beberapa dasawarsa sekarang ini. Pendanaan pengeluaran pendidikan meníngkat karena meningkatnya pengeluaran dalam sistem sekolah-sekolah.Pendanaan sekolah tidak sama dengan pengeluaran pendidikan, karena pertama belanja pendidikan mencakup tidak hanya pengeluaran untuk kegiatan rutin (seperti pembayaran untuk ,layanan guru yang diberikan selama waktu tertentu) narnun juga pengeluaran pembangunan dengan istilah kapital/modal, Seperti pengeluaran untuk bangunan dan perlengkapan Perbaikan dan .renovasi bangunan yang tua dan Iain-Iain. Tidak hitung sebagai pengeluaran pendanaan rutin, hingga sebagian atau seluruh pengeluaran tadi secara nyata digunakan dalam waktunya.Sementara penyusutan bangunan dan perlengkapan (karena dipakai dan penyusutan karena usang) selama waktu sekarang dihitung sebagai pendanaan rutin. Selanjutnya pengeluaran kapital di masa sekarang akan mempengaruhi perhitungan pendanaan rutin selama nilai dari aset fisik sekolah terus bertambah. Pada waktu bersamaan pendanaan rutin dikeluarkan sekolah, pada prinsipnya pendanaan rutin mencakup pengeluaran langsung untuk belanja keperluan sekolah, sebab bila tidak dipendanaani pengajaran menjadi tersendat bahkan mungkin terhenti.”Pendanaan pengeluaran pendidikan juga harus memperhatikan pendanaan kesempatan (biaya implisit) yang hilang, yang seharusnya diterima atau diperoleh anak, tetapi karena ia sekolah ia kehilangan pendapatan itu atau jika anak tidak sekolah ia akan memperoleh keuntungan, sebagai contoh anak tidak bisa menjual koram. atau berdagang atau menjadi montir HP karena harus belajar di sekolah.“Siswa selama sekolah tidak bisa menggunakan waktunya untuk memperoleh pendapatan dan pekerjaan disebut earning forgone by students.[[8]](#footnote-9)”

“Pendanaan pendidikan adalah total pendanaan Yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik,keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan. Jenis pendanaan pendidikan dapat dikategorikan ke dalam; pendanaan langsung (direct cost), pendanaan tak langsung (indirect cost), privat cost, social cost dan monetary cost.”

a. Pendanaan Langsung (direct cost)

“Pendanaan pendidikan langsung (direct cost) merupakan penyelenggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, dan atau keluarga siswa. Pendanaan langsung ini lebih mudah karena diketahui oleh para wajib pajak dan data di sekolahpun tersedia, sementara pendanaan tidak langsung sulit untuk dihitung.Pendanaan langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk mempendanaani penyelenggaraan PBM, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapanż dan pendanaan perawatan.”

“Pendanaan langsung berpengaruh terhadap kualitas output pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Di Perguruantinggipendanaan ini digunakan untuk membiayai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.Kebanyakan pendanaan langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem persekolahan sendiri, dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor. Keperluan lain yang dikeluarkan seperti untuk keperluan antara lain:”

* Biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan laboratorium, pakaian praktik.
* Pendanaan transportasi/angkutan sekolah.
* Pendanaan buku pegangan guru dan buku di perpustakaan.
* Pendanaan UKS dan pendanaan penyelenggaraan counseling.
* Pendanaan mendatangkan guru tambahan/ nara sumber

“Sumber-sumber pembiayaan pendidkan dan alokasinya telah dicantumkan dalam suatu rencana lima tahunan atau repelita, berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sumber dana pemerintah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orangtua siswa, maasyarakat, yayasan, perusahaaan, dan bantuan luar negeri.Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Aggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu juga terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah ditentukan jumlahnya berdasar pada kaarkteristik siswa dan jenjang pendidikanya.Dana dari pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat kabuapten/kota.Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada didaerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan[[9]](#footnote-10).”

“Menurut peraturan MENDIKNAS No 69 Th 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biya yang di perlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teraur sesuai standar pendidikan nasional. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai oleh BOS.”

b. Pendanaan Tidak Langsung (indirect cost) berbentuk pendanaan hidup

“Biaya tidak langsung (indirect cost), yang dikeluarkan oleh keluarga dan anak yang belajar Untuk keperluan sekolah, pendanaan dikeluarkan tidak langsung oleh digunakankeluarga, oleh lembaga. pendidikan, melainkan biaya peserta didik yang anak atau orang yang menanggung mengikuti pendidikan. Pendanaan tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya.Misainya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan adalah biaya seperti pendapatan yang hilang ketika siswa belajar.Pendanaan tidak langsung harus memperhitungkan juga pendanaan yang hilang ketika anak belajar. Pendapatan peserta didik hilang karena sedang mengikuti pendidikan, begitu juga dengan pendanaan pengorbanan-pengorbanan lain yang dikeluarkan oleh peserta didik maupun keluarganya, karena kegiatan usaha menjadi terbengkalai akibat memperjuangkan atau pengorbanan yang dikeluarkan demi pendidikan anaknya termasuk pendanaan stress peserta didik akibat dimarahi guru dan guru tersebut tidak menunjukkan jalan keluarnya (solusinya).”

c. Private Cost

“Privat cost merupakan keseluruhan pendanaan yang dikeluarkan keluarga, atau segala pendanaan yang harus ditanggung dan dikeluarkan. oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Misalnya keluarga membayar guru -les private supaya anaknya pandai bahasa Inggris dan matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai menggunakan computer.[[10]](#footnote-11)”

d. social cost

“social cost merupakan pendanaan yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk mempendanaani segaja keperluan belajar,Pendanaanini pendanaan yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orangtua saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orangtua dan masyarakat.Pendanaan dari masyarakat di Indonesia sebelum anggaran pendidikan sebesar 20%, biasanya/pernah dikeluarkan melalui BP3 dan melalui Komite Sekolah.Namun sekarang untuk Pendidjkan Dasar (SD dan SMP) pemerintah melarang ada biaya tambahan selain yang dikeluarkan pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20% telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sekolah.Anggaran pendanaan pendidikan yang 20% sudah termasuk partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakân pendidikam karena pendanaan ini berasal dari pajak yang dipungut pemerjntah untuk pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan pendidikan.”

“Di samping dari pemerintah dan dari orang tua siswa, biaya pendidikan dapat pula diperoleh dari sumbangan masyarakat secara perorangan maupun sumbangan yang melalui organisasi yang ada di dalam maupun luar negeri. Sumbangan biaya pendidikan dari masyarakat biasanya dalam bentuk barang peralatan dan jasa yang sifatnya tidak mengikat.Sumbangan ini sulit untuk di data, dan selalu kurang diperhitungkan dalam perencanaan biaya pendidikan.Sumber dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentinan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Sumber dana ini sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan pendidikan, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta (sekolah swasta).”

“Salah satu bentuk sumbangan dari masyarakat seperti; CSR, Hibah, Wakaf. CSR (Program Corporate Social Reponsibility) adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program social, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan.Sumber dana dari orang tua siswa berasal dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang selanjutnya menjadi dana pembinaan penddikan (DPP), dan dari sumbangan organisasi persatuan orang tua murid dan guru (POMG). Dewasa ini, untuk sekolah-seklah yang diselenggarakan oleh pemerintahsekolah (negeri), sumberdana dari orang tua siswa sudah banyak yang tidak digunakan lagi karene ada kebijakan sekolah gratis ditingkat pemerintahan pusat dan daerah.Sumber dana dari bantuan luar ngeri adalah berupa pinjaman(loan) dan hibah (grant) dari negara asing atau dari badan-badan yang berada diluar negeri. Dan dana bantuan luar negeri digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan progarm-program pembangunan pendidikan di Indonesia. Bantuan dalam bentuk pinjaman merupakan penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, jasa maupun barang atau peralatan yang diperoleh dari negara asing, dari lembaga keuangan Internasional, dan dari badan internasional lainnya yang harus dibayar kembali. Sedangkan bantuan dalam bentuk hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dalam bentuk jasa maupun barang atau peralatan yang diperoleh dari negara asing, dari lembaga keuangan Internasional, dan dari badan internasional lainnya yang tidak harus dibayar kembali.[[11]](#footnote-12)”

“Pendanaan pendidikan juga perlu memperhitungkan pendanaan yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah kedinasan, pendanaan kegiatan pendidikan di luar departeman pendidikan nasional, sekolah non reguler, pendidikan dalam lingkungan militerı pendanaan pembayaran pajak buku dan peralatan dan pendanaan penyusutan.”

e. Monetary Coşt

“Monetary Cost. Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga pendanaan yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk seperti itu, melainkan berbentuk jasa, tenaga dan waktu, pendanaan semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada / dengan nilai uang, pendanaan yang dikeluarkan untuk keperluan semacam ini disebut pendanaan moneter atau disebut Monetary Cost.[[12]](#footnote-13)”

f. Biaya Belajar

PendidikanYang dikeıuarkan oleh siswa diberbagai tingkat selaıu seragam tergantung pada jenis pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini/TK SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA/SMK, apabila dihitung biasanya meliputi:

* Iuran siswa
* Pendanaan satuan kredit semester (SKS) persemester intra dan ekstra.
* Pendanaan peralatan, seperti buku paket dan ATK. Pengeluaran pribadi.
* Pendanaan yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila tidak sekolah.
* Bunga kumulatif tahunan (deflasi) biasanya sebesar 4% terhadap jumlah semua angka pengeluaran tersebut.[[13]](#footnote-14)

Pendanaan mutu sekolah khusus Sekolah Dasar, secara keseluruhan dapat tergambarkan oleh hasil penelitian untuk katan mutu SD. Artinya secara sungguh-sungguh dikelola supaya pelaksanaan pendidikan bukan hanya berjalan apa adanya tetapi setiap uang yang dikeluarkan dikaitkan kepada perbaikan - pembelajaran. Sambil belanja rutin untuk pembelajaran di keluarkan, pengeluaran juga terkait pada usaha perbaikan layanan mutu mengajar[[14]](#footnote-15).Berdasarkan hasil studi terhadap SD di Kota Bandung yang dilakukan oleh Nanang Fatah pendanaan yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan terdiri dari pendanaan untuk:

* Gaji/Kesejahteraan Pegawai.
* Pembinaan Profesi Guru.
* Pengadaan Alat Pelajaran.
* Pengadaan Bahan. Perawatan.
* Pengadaan sarana kelas.
* Pengadaan sarana sekolah.
* Pembinaan Siswa,
* Pengelolaan Sekolah.

e. Kondisi Pembiayaan Pendidikan

“Masalah pendidikan di Indonesia ibarat benang yang kusut, sehingga ada kesulitan harus dari mana memulainya agar masalah tersebut dapat diselesaikan se cara tuntas. Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan hanya karena sistem pendidikan, tetapi dapat diduga pula dikarenakan oleh para pelaku penyelenggara pendidikan itu sendiri. Mirisnya lagi, yang dapat mengenyam pendidikan bermutu kebanyakan hanya orang-orang golongan atas, sementara orang-orang dari golongan bawah hanya bisa diam dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada realitanya, masih cukup banyak ditemui usia sekolah yang tidak bersekolah karena terbentur masalah biaya pendidikan yang mahal. Akibat kondisi tersebut , terjadi pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan di mana-mana. Kondisi ini mencerminkan bahwa keter jangkauan pembiayaan pendidikan masih jauh dari harapan masyarakat, sehingga perlu ada langkah yang tepat baik dari Pemerintah bersama masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah pembiayaan pendidikan.[[15]](#footnote-16)” “Saat ini, penerapan pembiayaan pendidikan belum dapat sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada peserta didik dari kalangan kurang beruntung dari segi ekonomi. Ke depan, diharapkan sistem pembiayaan pendidikan dapat mencerminkan ketercapaian mutu pendidikan. Menyikapi tuntutan masyarakat dewasa ini terhadap mutu pendidikan yang tinggi, maka perlu mengadopsi sistem pembiayaan subsidi silang di mana dalam sistem tersebut diprioritaskan untuk siswa yang tidak memiliki akses kepada pendidikan karena secara ekonomi kurang mampu. Ini tercermin dalam Pasal 52 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di mana salah satu ketentuannya menetapkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerapkan sistem subsidi silang yang dia tur tersendiri oleh satuan pendidikan.”

“Berdasarkan hasil studi pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri yang dilakukan Fattah terungkap bahwa faktor-faktor internal sekolah memberikan kontribusi signifikan terhadap mutu pendidikan, yaitu: 1) kesejahteraan guru; 2) kemampuan guru; 3) sarana kelas; dan 4) buku-buku pelajaran. Keempat komponen tersebut dalam penyusuna RAPBS memerlukan skala prioritas dalam mendapatkan alokasi biaya.Faktor eksternal pendidikan, seperti keadaan ekonomi orang tua murid, aspirasi keluarga sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi-prestasi siswa.Hal itu dibuktikan dari hasil studi, yang dilakukan oleh Fattah (1999) bahwa mutu pendidikan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah pedesaan yang keadaan sosial ekonominya kurang.Sekolah-sekolah yang memiliki orang tua murid dengan lingkungan keluarga mampu mempunyai fasilitas yang bermutu, guru lebih berkemampuan menciptakan pengelolaan belajar baik, yang memungkinkan siswa belajar lebih baik dan pada akhirnya prestasi muridnya jauh lebih baik. Menurut Fattah melihat perkembangannya, anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu: 1) sebagai alat penaksir; 2) sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan; 3) sebagai alat efisiensi. Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian.Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang s tandar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang, dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan.[[16]](#footnote-17)”

“Peranan anggaran dalam pengelolaan pembelajaran yang berkaitan dengan layanan belajar dan manajemen sekolah serta manajemen sekolah secara keseluruhan tentu sangatlah penting untuk mencapai tu juan .Anggaran pendidikan merupakan pola organisasi yang dirinci menjadi elemen-elemen dari rencana terpadu ke dalam komponen bagian atau departemen yang memudahkan biaya estimasi. Efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input dan output atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan, efisiensi pendidikan mempunyai kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi.[[17]](#footnote-18)”

**DAFTAR PUSTAKA**

Bapenas, *Konfrensi pendidikan indoensia, mengatasi krisis menuju pembaharua,* Jakarta: Depdikbud, 1999.

Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014

Ferdi W. P, PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN *TEORITIS FINANCING OF EDUCATION: A THEORITICAL STUDY*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, 4, 2013

Gaffar Fakary, *Perencanaan Pendidikan, Teori dan metodologi,* Jakarta: Depdikbud, 1987

Nanang Fattah, *Studi tentang pembiayaan Sekolah Dasar,* Rangkuman Disertasi. PFS, IKIP Bandung, 1999.

Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya,. 1998

Martin, *Manajemen pembiayaan pendidikan : konsep dan aplikasinya*, Jakarta:PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.

Renny Oktafia, *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PONDOK PESANTREN seBAGAi UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING,*  JURNAL EKONOMI ISLAM Volume 8, Nomor 1, Mei 2017.

Thomas Allan, *The Productive School. A System Analysis Approach to educational Administration,* New York: Jhon Wley and Sons, Inc 1971.

1. Gaffar Fakary, *Perencanaan Pendidikan, Teori dan metodologi,* Jakarta: Depdikbud, 1987. [↑](#footnote-ref-2)
2. Thomas Allan, *The Productive School. A System Analysis Approach to educational Administration,* New York: Jhon Wley and Sons, Inc 1971. 31. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014. 63 [↑](#footnote-ref-4)
4. Bapenas, *Konfrensi pendidikan indoensia, mengatasi krisis menuju pembaharua,* Jakarta: Depdikbud, 1999. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014. 68. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid., 70. [↑](#footnote-ref-7)
7. Renny Oktafia, *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PONDOK PESANTREN seBAGAi UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING,*  JURNAL EKONOMI ISLAM Volume 8, Nomor 1, Mei 2017. 73. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014. 23. [↑](#footnote-ref-9)
9. Martin, *Manajemen pembiayaan pendidikan : konsep dan aplikasinya*, Jakarta:PT.RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014. 8. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 24. [↑](#footnote-ref-11)
11. Martin, *Manajemen pembiayaan pendidikan : konsep dan aplikasinya*, 120 [↑](#footnote-ref-12)
12. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 25 [↑](#footnote-ref-13)
13. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, 26 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nanang Fatah, *Studi tentang pembiayaan Sekolah Dasar,* Rangkuman Disertasi. PFS, IKIP Bandung, 1999. 4. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ferdi W. P, PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN *TEORITIS FINANCING OF EDUCATION: A THEORITICAL STUDY*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, 4, 2013. 571 [↑](#footnote-ref-16)
16. Fattah.*Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung:PTRemaja Rosda Karya. 1998 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ferdi W. P, PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: SUATU KAJIAN *TEORITIS FINANCING OF EDUCATION: A THEORITICAL STUDY.* 572. [↑](#footnote-ref-18)